

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan mengenai implementasi kebijakan IPTEK di lembaga penelitian publik. Secara umum dapat disebutkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa semua faktor yang disebutkan oleh Edward III (1980) memiliki pengaruh yang hampir mirip kepada implementasi kebijakan IPTEK di lembaga penelitian publik. Namun masih ada variasi yang dapat membedakan kekuatan antar faktor.

Faktor penting dalam mendorong penerapan kebijakan penelitian dan pengembangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor komunikasi dan sistem *reward and punishment*, dimana komunikasi yang tidak memadai menghambat implementasi kebijakan litbang, sedangkan sistem *reward and punishment* hanya mengenal *punishment* saja sehingga membuat kondisi yang kurang menguntungkan bagi penerapan kebijakan litbang itu. Perbaikan pada kedua faktor ini dapat meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan litbang di lembaga penelitian publik. Sayangnya tidak dapat terlihat dampak dari penerapan kebijakan litbang ini di tingkat publik, karena perubahannya belum terasa di masyarakat.

Sedangkan kesimpulan lain yang sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian adalah:

1. Faktor-faktor implementasi kebijakan di lembaga penelitian publik dirasakan belum optimal disebabkan oleh :
 - Faktor paling berpengaruh pada implementasi secara umum adalah faktor komunikasi. Bila dilihat baik dari dalam kerangka teori maupun bila dilihat dari pertanyaan tambahan, terlihat komunikasi merupakan faktor yang dominan dalam implementasi kebijakan litbang. Hal ini diperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Romadona & Setiawan, walaupun menggunakan pendekatan yang berbeda.

- Faktor lain adalah, bila melihat pertanyaan tambahan dari dampak dan melihat item mengenai insentif, maka terlihat bahwa sistem *reward* dan *punishment* juga banyak mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam kasus di lembaga penelitian publik ini terjadi secara negatif, dipandang terlalu banyak *punishment* dibandingkan *reward* sehingga menghambat implementasi kebijakan
 - Sedangkan faktor yang dianggap paling tidak berpengaruh, walaupun tidak semua *key informant* menyatakan demikian adalah faktor disposisi/sikap. Banyak *key informant* yang secara implisit menyatakan faktor ini kurang penting dalam implementasi kebijakan khususnya dalam kasus di lembaga penelitian publik.
2. Dampak implementasi kebijakan litbang dalam pengembangan organisasi litbang adalah :
- Secara internal terjadi penurunan output dari lembaga karena para staf masih terpaku kepada perubahan kebijakan dan organisasi, serta anggaran penelitian yang belum ada.
 - Terjadi peningkatan efisiensi anggaran karena penurunan anggaran dengan output yang relatif sama (walaupun menurun). Namun hal tersebut karena data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya di LIPI belum sepenuhnya habis untuk ditulis
 - Secara eksternal kiprah BRIN masih belum dikenal masyarakat karena masih sangat baru terbentuk

B. Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, problem utama yang ada adalah komunikasi dan ketidakseimbangan dari *reward* dan *punishment*. Maka sebagai saran dari tulisan ini adalah dalam menerapkan kebijakan publik utamanya di lembaga penelitian publik, selain memperhatikan kedua hal tersebut, perlunya meningkatkan :

- Komunikasi.
Bila tidak dilakukan komunikasi yang baik, maka dapat menimbulkan resistensi terhadap upaya penerapan kebijakan tersebut yang diakibatkan oleh adanya kecurigaan terhadap kebijakan yang diterapkan

itu. Komunikasi yang jujur, terbuka, sesuai dengan kenyataan dan secara terus menerus akan dapat menurunkan hambatan bagi penerapan kebijakan.

- Sumberdaya

Akumulasi dari berbagai sumberdaya merupakan salah satu langkah dari implementasi kebijakan, kurangnya sumberdaya dapat menyebabkan implementasi kebijakan akan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah mempunyai sumberdaya yang cukup dan tepat dalam penempatan, walaupun tidak harus banyak.

- Disposisi/Sikap

Sebagian besar *key informant* yang secara implisit menyatakan faktor ini kurang penting dalam implementasi kebijakan khususnya dalam kasus di lembaga penelitian publik, namun jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efisien dan efektif, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- Struktur Birokrasi

Ketidak efisienan dalam struktur birokrasi menyebabkan ketidak efektifan implementasi kebijakan. Struktur organisasi harus jelas sehingga tidak ada tumpang-tindih dalam pertanggung-jawaban.

- Pemberian *reward* yang sesuai.

Seringkali melakukan *reward*, seringkali implementator atau pengambil kebijakan merasa terkungkung oleh aturan pemerintah, namun banyak cara yang lebih bijak untuk memberikan *reward* walaupun tidak secara langsung

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. S. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ambarawati, A. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative.
- Aminullah, E. 2015. *Learning, R&D Intensity And Economic Prosperity In Low R&D Countries (LRDCs) : Envisioning The Indonesian Future. ASIALIC 2015*. Yogyakarta: LIPI.
- Anderson, J. 1979. *Public Policy Making*, (Second ed.), New York : Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Anik, G. 2007. *Panduan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Asmara, Y. A., Oktaviyanti, D., Alamsyah, P., & Zulhamdani, M. 2016. Science-Techno Park and Industrial Policy in Indonesia. *Korea and the World Economy XV*. Seoul.
- Barnard, C. I. 1938. *The Functions of the Executive*. Harvard University Press.
- Berelson, B., & Steiner, G. 1964. *Human Behaviour an Inventory of Scientific Finding*. New York.
- Bona, M. F. 2022. *Setahun, BRIN Mampu Hemat Anggaran Riset Rp 19 Triliun*. Retrieved 10 10, 2022, from Beritasatu: <https://www.beritasatu.com/news/963073/setahun-brin-mampu-hemat-anggaran-riset-rp-19-triliun>
- Borg, W. R. and M. D. Gall. 1989. *Educational Research: An Introduction*. Fifth Edition. New York and London: Longman
- Brinkerhoff, D., & Crosby, B. 2002. *Managing Policy Implementation*. Connecticut: Kumarian Press.
- Chaizi, N. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Cowan, R., & Paal, Gert van de. 2000. *Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy*. Luxembourg: Commission of the European Communities.

- Davis, K., & Newstrom, J. W. 1981. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. McGraw-Hill.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Dye, T. R. 1992. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Edquist, C. 2001. *The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art*. Paper presented at the DRUID Conference 'National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies', Aalborg.
- Edwards III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Egeberg, M. 2020. *Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration*. *Public Administration*, 98(3), 801-804.
- Forje, J. W. 2008. *National Policy on Science and Technology: An Integral Component of Development Strategy for African Countries*. In Kitetu, Catherine Wawasi (Ed). *Gender, Science and Technology : Perspectives from Africa*. Dakar: Gender Series Volume 6.
- Gay, L. R. 1991. *Educational Evaluation and Measurement; Competencies for Analysis and Application*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Harsono, H. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya,
- Hill, M. dan Peter H. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publications.
- Ildirar, M., Özmen, M., & İşcan, E. 2016. The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth: New Evidences. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES*, (pp. 36-43).
- Islamy, M. I. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

- Klitsie, J. B., Price, R. A., & Lille, C. S. 2019. Overcoming the Valley of Death: A Design Innovation Perspective. *DMI journal*, 14, 23-41.
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. 2011. *Public policy analysis*. Bristol University Press.
- Knowledge Sector Initiative. 2021, 22 12. *Policy Communication is Beyond Policy Dissemination*. Retrieved 05 12, 2022, from Knowledge Sector Initiative: <https://www.ksi-indonesia.org/en/wawasan/detail/2525-policy-communication-is-beyond-policy-dissemination>
- LIPI. 2017. *Indikator Iptek*. PAPPIPTEK-LIPI.
- Lundvall, . & Borrás, S. 2005. Science, Technology and Innovation Policy. In Fagerberg, Jan, Mowery, David C. and Nelson, Richard R. (Ed). *Innovation Handbook*. Oxford: Oxford University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. 1989. *Implementation and Public Policy*. University Press of America.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data Analysis: A Source book of New Methods*. Beverly Hills: SAGE.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.
- Mustopadidjaja, A. 2000. *Sistem dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN.
- Mutangili, S. K. 2020. Influence of Assertive Leadership on Organizational Development: A Case of Kenya Power and Lighting Company (KPLC). *Journal of Human Resource & Leadership*, 4(5), 21-34.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyatiningsih, E. 2012. *Metodologi Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Alfabeta
- Nawi, R. 2015. Implementation of The Communicating Policy of The Organization of Government in Indonesia. *Journal of Humanities*, 3(1), 28-41.
- Nugroho, R. D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pradana, A. W., Jayanthi, R., Dinaseviani, A., Purwadi, & Nashihuddin, W. 2021. Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai

Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia. *Jurnal Inovasi Kebijakan : Matra Pembaruan*, 5(1).

Prastiwi, D. P. & Aisyaturrahmi. 2019. Model of Reward System Toward The Performance of Public Sector Organizations. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Pilsen: IEOM Society International.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puslitjaknov. 2008. *Metode Penelitian Pengembangan*. Departemen Pendidikan Nasional.

Putra, N. 2012. *Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Romadona, M. R., & Setiawan, S. 2018. Impact of Communication in Organization to Readiness for Change: Case of Research Organization X. *SU-AFBE 2018*. Jakarta: European Alliance for Innovation .

Romadona, M. R., & Setiawan, S. 2021. Researchers' View on R&D Organizational Change Using the Grief Cycle. *STIPM Journal*, 157-171.

Repley, Randall B. 1985. *Policy Analysis In Political Science*. Cicago : Nelson Hall Inc.

Sager, F., & Gofen, A. 2022. The polity of implementation: Organizational and institutional arrangements in policy implementation. *Governance*, 35(2), 347-364.

Scimago. 2021. Retrieved 11 25, 2021, from www.scimago.com: <https://www.scimagojr.com/>

Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sinambela, S. 2020. The Effect of Workload on Job Stress, Work Motivation, and Employee Performance. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 1316-1333.

Siswosudarmo, M., Aminullah, E., & Soesilo, B. 2001. *Analisis Sistem Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

- Sulistiyoningrum, Y. 2015, Juni 22. *Jurang Antara Lembaga Penelitian dan Industri Hambat Inovasi*. Retrieved Desember 16, 2021, from Bisnis.com: <https://teknologi.bisnis.com/read/20150622/84/446060/jurang-antara-lembaga-penelitian-dan-industri-hambat-inovasi->
- Sumaryana, A. 2013. Faktor Lingkungan Dalam Manajemen Publik. *Sosiohumaniora*, 15(1), 1-5.
- Sutrisno, E. 2009. *Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program*. Surabaya: Untag Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, H. N., & Setyawati, E. B. 2007. *Responsivitas Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Taufik, T. A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Jakarta: BPPT.
- Tempo.co. 2015, Juni 23. *Jurang Antara Penelitian dan Industri Hambat Kreativitas*. Retrieved Desember 15, 2021, from LIPI: <http://lipi.go.id/berita/single/Jurang-Antara-Penelitian-dan-Industri-Hambat-Kreativitas/11413>
- Theintactone. 2019, 02 25. *Organization Structure in Policy Implementation*. Retrieved 05 12, 2022, from Theintactone: <https://theintactone.com/2019/02/25/bps-u4-topic-6-organization-structure-in-policy-implementation/#:~:text=Strategies%20do%20not%20take%20place,are%20feasible%20and%20most%20optimal.>
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. 1991. *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform In Developing Countries*. Abe Books.
- UNESCO. 2017. *UIS Data Center*. Retrieved 11 23, 2021, from Unesco: <http://data.uis.unesco.org/>
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, S. A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- World Intellectual Property Organization. 2021. Retrieved 11 25, 2021, from WIPO: <https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics>

LAMPIRAN

Kisi Alat Ukur Faktor Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan

Dimensi	Indikator	Item	Pertanyaan
Komunikasi	Transmisi	Adanya komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
	Kejelasan	Kejelasan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya adanya kejelasan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
	Konsistensi	Konsistensi materi kebijakan litbang dalam melakukan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya konsistensi materi kebijakan litbang dalam melakukan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
Sumberdaya	Staf	Adanya personel untuk melakukan penyebaran dan implementasi kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya jika ketersediaan cukup personel atau staf untuk melakukan penyebaran dan

			implementasi kebijakan litbang?
	Informasi	Adanya cukup informasi untuk dapat digunakan dalam implementasi kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai dibutuhkannya cukup informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan untuk melakukan implementasi kebijakan litbang?
	Wewenang	Adanya wewenang yang cukup bagi personel dan kebijakannya sendiri dalam melakukan penyebaran dan implementasi litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perlunya wewenang yang cukup bagi personel dan kebijakannya sendiri dalam melakukan penyebaran dan implementasi litbang?
	Fasilitas	Adanya fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan amanah dari kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebutuhan adanya fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan amanah dari kebijakan litbang?
Disposisi/Sikap	Pelaksanaan Kebijakan	Adanya perintah yang tegas dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perlunya perintah yang tegas dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan litbang?

	Insentif	Diberikan insentif berdasarkan koridor yang jelas dalam melaksanakan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu perlunya insentif dalam melaksanakan kebijakan di bidang litbang bila sebuah kebijakan litbang akan diterapkan?
Struktur Birokrasi	Struktur Organisasi	Adanya struktur organisasi yang mendukung dalam implementasi kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pentingnya keberadaan struktur organisasi yang mendukung dalam implementasi kebijakan litbang?
	SOP	Adanya SOP dalam organisasi litbang yang mendukung dalam implementasi kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang harus adanya SOP yang mendukung dalam organisasi litbang penting dalam implementasi kebijakan litbang?
	Fragmentasi	Adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi dalam penerapan kebijakan litbang	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya pengaruh eksternal yang mungkin ada akan sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan litbang?

PANDUAN WAWANCARA

Faktor Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan

Nama	
Departemen	
Lama Bekerja	

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebijaksanaan instansi dalam mendukung kegiatan Litbang selama ini?
2. Apakah bentuk kebijakan yang telah dibuat dalam mendukung kegiatan Litbang?
3. Menurut bapak/ibu kebijakan-kebijakan Litbang apa saja yang digunakan dalam mendukung kegiatan Litbang selama ini?
4. Menurut bapak/ibu apakah selama ini kegiatan penelitian dilakukan dengan mengacu kebijakan Litbang yang sudah ada?
5. Apa yang menjadi dasar digunakannya kebijakan tersebut?
6. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan Litbang yang ada sekarang ini dirasakan sudah mendukung penelitian?
7. Apakah masih ada kebijakan yang dirasakan belum mendukung kegiatan litbang?
8. Menurut bapak/ibu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Litbang tersebut?
9. Menurut bapak/ibu masalah dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
10. Menurut bapak/ibu kebijakan apa yang sebaiknya dibuat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan litbang?
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya adanya kejelasan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
13. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya konsistensi materi kebijakan litbang dalam melakukan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan litbang?
14. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya jika ketersediaan cukup personel atau staf untuk melakukan penyebaran dan implementasi kebijakan litbang?

15. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai dibutuhkannya cukup informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan untuk melakukan implementasi kebijakan litbang?
16. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perlunya wewenang yang cukup bagi personel dan kebijakannya sendiri dalam melakukan penyebaran dan implementasi litbang?
17. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebutuhan adanya fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan amanah dari kebijakan litbang?
18. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perlunya perintah yang tegas dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan litbang?
19. Bagaimana pendapat bapak/ibu perlunya insentif dalam melaksanakan kebijakan di bidang litbang bila sebuah kebijakan litbang akan diterapkan?
20. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pentingnya keberadaan struktur organisasi yang mendukung dalam implementasi kebijakan litbang?
21. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang harus adanya SOP yang mendukung dalam organisasi litbang penting dalam implementasi kebijakan litbang?
22. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya pengaruh eksternal yang mungkin ada akan sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan litbang?
23. Dapatkah bapak/ibu ceritakan latar belakang kejadian selama penerapan kebijakan litbang berlangsung?
24. Mohon bapak/ibu bisa menjelaskan dampak dari kebijakan litbang yang telah diterapkan, baik untuk internal organisasi maupun masyarakat umum

Tabel Hasil

Tabel 1 Komunikasi

RPi1	RPe1	RPe2	RPe3	RPe4	Rpe5	RN1	Ex1
Transmisi							
Kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik jika tanpa ada pola komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf/peneliti	Sangat penting	Komunikasi penting, terlebih ada kebijakan baru yang muncul. Komunikasi dapat memberikan pemahaman kepada peneliti terkait kebijakan yang ada. Bisa melalui sosialisasi	Super penting, karena hanya dengan komunikasi semua dapat mengetahui betapa pentingnya kebijakan itu dibuat. Oleh sebab itu semua pihak bisa mendukungnya, jika tidak sikap kecurigaan akan menyebabkan resistensi.	Sangat penting agar semua pihak mengetahui akan kebijakan yang hendak diberlakukan	Sangat penting	Sangat penting	Sangat penting, agar semua bagian dalam struktur organisasi mendapatkan informasi yang jelas.
Kejelasan							
Komunikasi harus disampaikan	Sangat penting	Sangat penting faktor kejelasan	Amat sangat penting, karena hanya dengan	Sangat penting, karena	Sangat penting	Sangat penting, kejelasan	Sangat penting, agar bisa dipahami dari struktur organisasi paling atas

secara sangat jelas antara pimpinan dan staf/peneliti, mengingat komunikasi menjadi modal penting di dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan		dalam komunikasi. Semakin jelas semakin baik dan dapat dipahami oleh semua peneliti	kejelasan komunikasi maka para staf termasuk peneliti akan mengetahui mengenai tujuan dan bagaimana kebijakan litbang yang akan diterapkan sehingga mereka bisa ikut menyukseskan penerapan kebijakan itu. Jika tidak ketidaktahuan akan kebijakan dan latar belakangnya akan menyebabkan resistensi akan kebijakan itu.	dengan jelasnya komunikasi akan menyebabkan semua pihak akan 'clear' terhadap maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan		komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.	sampai ke bawah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas di dalamnya dapat berjalan dengan baik.
Konsistensi							
Semakin konsistensi materi	Sangat penting	Sangat penting. Konsistensi	Amat penting, karena hanya dengan	Sangat penting, karena hanya	Sangat penting	Kebijakan yang diformulasikan	Materi kebijakan Litbang sebaiknya dilakukan secara konsisten

kebijakan litbang, maka akan semakin mudah dalam penyampaian kebijakan, sehingga tidak ada mis komunikasi antar berbagai pihak dalam proses penyampaian pesan kebijakan		akan menghilangkan kebingungan terkait pemahaman kebijakan oleh peneliti	konsistensi kebijakan dan penerapannya maka pengawai akan tidak bingung dan tidak resisten, serta bisa ikut serta dalam menyukseskan penerapan kebijakan litbang tersebut.	dengan konsistensi maka maksud dan tujuan kebijakan yang akan diterapkan dapat diketahui semua pihak		berdasarkan bukti/data ilmiah pada saat disampaikan dan diuji publik seharusnya materi kebijakan akan konsisten	sehingga bisa selalu tertanam pada setiap personel.
---	--	--	--	--	--	---	---

Tabel 2 Sumber Daya

RPi1	RPe1	RPe2	RPe3	RPe4	RPe5	RN1	EX1
Staf							
Salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan ialah adanya sumber daya manusia (SDM) yang cukup sebagai pelaksana. Hal ini tentu menjadi bagian sangat	Cukup penting	Ketersediaan SDM di dalam penyebaran informasi sangat penting. Yang penting adalah "cukup" dan tidak harus	Penting, hanya dengan sumberdaya termasuk SDM yang cukup, maka kebijakan litbang dapat diterapkan	Dengan SDM yang baik, maka kebijakan dapat diterapkan dengan mudah, walau	Penting	Penyebaran dan implementasi kebijakan litbang dalam dilakukan dengan memanfaatkan	Penting, untuk melaksanakan kebijakan perlu orang yang cukup untuk melaksanakannya. Jika tidak akan menyebabkan

penting dalam hal ini, termasuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan litbang.		“banyak”. Jika SDM cukup maka semua orang dapat terinformasikan kebijakan yang ada		kadang kala dengan instruksi dan bimbingan dari atas yang baik, maka dapat juga dijalankan dengan baik walau SDM nya kurang baik		media digital yang ada tanpa menyediakan personil/staf yang banyak	beban lebih dan motivasi akan menurun.
Informasi							
Informasi menjadi salah satu element kunci dalam implementasi kebijakan, begitu pula untuk implementasi kebijakan litbang. Tanpa informasi yang memadai, maka suatu kebijakan tidak dapat berjalan/terimplementasi secara optimal.	Sangat penting	Kecukupan informasi merupakan faktor krusial, karena dengan adanya kecukupan informasi akan meningkatkan pemahaman audiens	Amat sangat penting, karena hanya dengan informasi yang cukup dan terdiseminasi dengan baik, maka pegawai akan mengerti mengenai maksud dan tujuan sebuah kebijakan litbang akan diterapkan sehingga akan mengurangi resistensi dan mempercepat	Informasi sangat penting dalam upaya penerapan sebuah kebijakan	Sangat penting	Informasi yang cukup dan berbasis riset/bukti ilmiah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang akan diterapkan dapat berhasil.	Penting dan sebaiknya informasi yang diberikan sebaiknya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh semua personel.

			penerapan kebijakan litbang				
Wewenang							
Wewenang dalam proses implementasi kebijakan juga menjadi salah satu instrumen agar suatu kebijakan dapat berjalan. Hal ini tentu berlaku pula untuk implementasi kebijakan litbang dimana adanya wewenang akan memudahkan pelaksana kebijakan dapat merespon serta menyesuaikan segala kebutuhan selama proses implementasi kebijakan.	Sangat penting	Kurang begitu memahami pertanyaanya	Wewenang yang cukup amat sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan. Bila baik personal/pejabat yang menerapkan dan juga kebijakan itu sendiri tidak memiliki wewenang yang cukup, maka tentu saja penerapan kebijakan itu setidaknya akan sangat sulit bahkan bisa gagal.	Wewenang terutama bagi atasan atau implementator sebuah kebijakan sangat penting	Sangat penting	Wewenang personel dalam implementasi kebijakan hendaknya melihat sesuai dengan SOTK yang ditugaskan kepada personel/staf	Penting, kalau tidak ada wewenang untuk menerapkan kebijakan, gimana caranya menerapkannya?
Fasilitas							
Fasilitas menjadi hal penting mengingat kebijakan yang sudah	Sangat penting	Fasilitas penting karena dapat	Fasilitas sangat penting untuk melakukan	Penting untuk mendukung sebuah usaha	Sangat penting	Sangat dibutuhkan	Fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk

ditetapkan dan dirumuskan perlu adanya fasilitas agar dapat dimudahkan dalam pelaksanaannya. Seringkali kebijakan litbang justru memerlukan fasilitas khusus yang tidak dimiliki oleh kebijakan lain seperti laboratorium riset, program pendanaan yang multi years, dan lainnya		mendukung penyebaran informasi	penerapan kebijakan litbang. Tanpa fasilitas yang cukup dalam mendukung penerapan kebijakan litbang tentu saja penerapannya akan sulit dilaksanakan, bila dipaksakan akan menyebabkan resistensi	penerapan kebijakan			dapat mendukung semua kegiatan Litbang.
--	--	--------------------------------	--	---------------------	--	--	---

Tabel 3. Disposisi/Sikap

RPi1	RPe1	RPe2	RPe3	RPe4	RPe5	RN1	EX1
Pelaksanaan Kebijakan							
Adanya perintah tegas dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan tentu harus dilihat dari apakah	Kurang penting	Ketegasan merupakan sikap penting karena melalui ketegasan implementasi	Perintah yang tegas diperlukan dalam penerapan kebijakan litbang, walau demikian	Kurang relevan, karena seringkali walau ada perintah tegas, namun bawahan bisa tetap tidak menjalankan	Penting, untuk penekanan dari atas	Pelaksanaan atau penerapan kebijakan memerlukan perintah yang sesuai dengan isi	Tidak penting, seringkali ada pemimpin yang tegas tapi arah kebijakannya tidak jelas. Pendekatan lebih penting

kebijakan yang sudah ada tersebut memiliki kejelasan aturan atau tidak. Jika tidak/belum jelas aturannya maka diperlukan ketegasan perintah, namun jika sudah jelas aturannya maka hanya bentuk fasilitasi yang dijalankan. Begitu pula berlaku dalam penerapan kebijakan litbang dimana pimpinan seharusnya lebih banyak dalam memfasilitasi		riil dapat dilaksanakan	lebih diperlukan adanya upaya persuasif atau menunjukkan bahwa perlunya kebijakan litbang tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat dasar manusia yang independen dan akan sulit menerima jika terlalu represif.	jika tidak jelas informasinya		kebijakan yang ada dan bukan berdasarkan perintah yang tegas.	
Insentif							
Insentif dibutuhkan	Sangat penting	Insentif sangat perlu	Tanpa adanya	Relatif penting untuk	Cukup penting	Penting untuk Kebijakan	Penting karena dengan insentif bisa

untuk membangun minat seluruh pegawai/peneliti dan pimpinan agar keijakan yang akan diterapkan dengan baik		dilakukan, asalkan hal tersebut masih di dalam koridor peraturan yang ada untuk mendukung kebijakan yang sedang atau akan diterapkan.	insentif, maka akan sangat lama sebuah kebijakan litbang atau kebijakan bidang apapun untuk diterapkan, karena ketidak menarik bagi individu untuk menerapkan kebijakan yang akan diterapkan tersebut.	membangkitkan minat untuk menjalankan atau berusaha menerapkan kebijakan itu		yang dijalankan	memicu staf untuk menerapkan kebijakan
--	--	---	--	--	--	-----------------	--

Tabel 4. Struktur Birokrasi

RPi1	RPe1	RPe2	RPe3	RPe4	RPe5	RN1	EX1
Struktur Birokrasi							
Struktur organisasi di dalam suatu kebijakan sangat penting, begitu juga di struktur organisasi kebijakan litbang. Tanpa struktur,	Cukup penting	Sangat penting	Tentu saja struktur organisasi harus sesuai dengan kebijakan litbang yang diimplementasikan.	Kurang relevan, karena kemungkinan kebijakan itu akan merubah	Penting	Sangat penting agar implementasi kebijakan dapat dijalan mulai dari level atas hingga bawah	Struktur organisasi harus jelas sehingga tidak ada tumpang-tindih dalam

<p>suatu kebijakan litbang tidak mungkin bisa dijalankan, dan tidak bisa pula diketahui baik atau buruknya dan siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan kebijakan tersebut. Jadi, sudah pasti bahwa struktur organisasi ialah mereka yang menjalankan kebijakan litbang termasuk yang akan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari praktik kebijakan tersebut</p>			<p>Tanpa struktur organisasi yang sesuai, maka kebijakan litbang tidak mungkin akan ditetapkan. Oleh karena itu penting kiranya untuk melakukan kebijakan atau perubahan struktur organisasi terlebih dahulu baru melakukan penerapan kebijakan litbang yang bersifat mendasar.</p>	struktur organisasi			<p>pertanggung-jawaban.</p>
SOP							
<p>SOP untuk implementasi kebijakan menjadi hal penting, asalkan SOP tersebut tidak terlalu kaku atau justru merugikan pelaksana kebijakan yang pada gilirannya menghambat atau membuat kebijakan itu gagal. Demikian pula di</p>	Cukup penting	<p>Sangat penting, karena dengan SOP bisa menjadi lebih jelas kepada pelaksana kebijakan</p>	<p>SOP yang jelas dalam implementasi kebijakan litbang amat sangat penting. Tanpa SOP yang jelas maka penerapan kebijakan litbang akan lebih bersifat tambal sulam dan</p>	<p>Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah dalam penerapan kebijakan</p>	Penting	<p>Untuk kebijakan teknis sangat dibutuhkan adanya SOP</p>	<p>SOP yang baik dan jelas akan sangat membantu sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menjalankan tugas-tugas Litbang.</p>

implementasi kebijakan litbang, SOP sebaiknya dibuat sesederhana dan sefleksibel mungkin dengan melibatkan seluruh/perwakilan staf/peneliti di dalam pembuatannya.			semrawut pelaksanaannya. Sebaiknya tiap kebijakan litbang yang dibuat memiliki bagian yang menjelaskan SOP yang perlu dijalankan.				
Fragmentasi							
Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan tidak terlepas dari pengaruh eksternal. Kasus dipenerapan kebijakan litbang, pengaruh eksternal tersebut dapat disaring, mana yang berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan litbang atau yang berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan kebijakan litbang.	Sangat Penting	Pengaruh eksternal sangat mungkin terjadi, justru dengan adanya inisiatif2 dapat menghilangkan pengaruh eksternal yang dapat melencengkan dari jalur implementasi kebijakan	Pengaruh eksternal sangat mempengaruhi sebuah kebijakan. Idealnya tidak dipekenankan adanya pengaruh eksternal dalam melakukan kebijakan, kebijakan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Namun pada kenyataannya selalu terdapat pengaruh eksternal yang mempengaruhi	Setiap upaya penerapan kebijakan akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, jadi sangat penting	Penting	Kebijakan internal yang diimplementasikan akan mendapat pengaruh dari pihak eksternal jika kebijakan tersebut memberikan dampak kepada pihak eksternal baik dampak positif/negatif	Pengaruh eksternal sedikit banyak pasti ada, namun tidak boleh mempengaruhi nilai-nilai utama (idealisme) dalam suatu penerapan kebijakan litbang.

			<p>pembuatan kebijakan dan penerapan kebijakan itu sendiri. Dari semua pengaruh, politiklah yang paling banyak berpengaruh dan biasanya memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan litbang., karena akan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan golongan.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 5 Pertanyaan Tambahan

RPi1	RPe1	RPe2	RPe3	RPe4	RPe5	RN1	EX1
kebijaksanaan instansi dalam mendukung kegiatan Litbang							
Kebijakan instansi sangat mendukung aktivitas litbang karena pekerjaan dan tugas inti dari tempat kami ialah	Karena sebagai Lembaga litbang, inti pekerjaannya adalah	Instansi sesuai tupoksinya memiliki kebijakan di dalam melakukan kegiatan Litbang. Namun demikian, terdapat	Instansi cukup mendukung kebijakan litbang karena memang hal itu yang merupakan inti dari kegiatan lembaga.	Semuanya diusahakan mendukung	Mendukung	Kebijakan instansi sangat mendukung kegiatan litbang	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

kebijakan pengembangan kegiatan litbang	kegiatan litbang	“kebijaksanaan” yang kurang begitu tepat, misal target output tahunan yang cukup berat. Outut harus jurnal Q1 atau Q2, mencari dana penelitian dsb saya kira justru akan menghambat kegiatan riset, karena SDM akan capek memenuhi kriteria tersebut	Seluruh kebijakan di lembaga akan langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan litbang				
bentuk kebijakan yang telah dibuat dalam mendukung kegiatan Litbang							
Pendanaan litbang, kolaborasi riset dan publikasi, pemberian waktu kepada pegawai untuk sekolah, workshop/seminar ilmiah, emudahan dalam perizinan survei ke lapangan	Sudah mendukung, walaupun masih banyak peningkatan seperti system insentif buat peneliti, system punishment yang masih sangat membebankan peneliti, dukungan anggaran untuk conference	Penyediaan infrastruktur riset yang semakin digalakan. Untuk pendanaan riset mulai berkurang karena peneliti diharapkan mendapat pendanaan dari luar	Di tingkat nasional sebenarnya sudah ada UU Sisteknas dan segala aturan turunannya walau belum lengkap. Sedangkan di tingkat lembaga banyak diterapkan kebijakan litbang baru yang sebenarnya terlalu singkat antara keluar satu aturan/kebijakan dengan berikutnya. Hal ini menyebabkan	Kebijakan pendanaan, infrastruktur, kolaborasi dan lain-lain yang mendukung litbang	Kebijakan pembiayaan, SDM dan infrastruktur	Kebijakan distributif (memberikan akses secara terbuka bagi SDM, anggaran dan infrastruktur riset)	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

	dan publikasi (seperti proof reading, dll), anggaran riset, fasilitas pendukung seperti software, dll.		kebingungan di kalangan pegawai				
kebijakan-kebijakan Litbang apa saja yang digunakan dalam mendukung kegiatan Litbang							
Pendanaan kegiatan litbang dan kolaborasi riset/publikasi	System kompetisi proposal, sharing knowledge dan hasil penelitian antar peneliti, seminar proposal dan hasil	Kebijakan yang ada saat ini sudah cukup. Namun perlu di pikirkan kesejahteraan SDM, tidak hanya aspek finansial saja, namun output tahunan perlu di formulasikan ulang	Semua kebijakan yang dibuat dalam organisasi langsung tidak langsung akan berkaitan dengan kegiatan litbang. Namun kebijakan pemerintah secara umum kurang berfokus atau berpihak kepada pengembangan litbang. Contohnya UU mengenai litbang hanya pada tahun2 terakhir ini cukup berfungsi sebagaimana mestinya dan memiliki cukup kebijakan turunan agar kebijakan	Kayaknya sama dengan No. sebelumnya	Sama dengan sebelumnya	Peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, anggaran riset	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

			dapat dilaksanakan.				
kegiatan penelitian dilakukan dengan mengacu kebijakan Litbang yang sudah ada							
Iya sudah mengacu karena di tempat kami memang fokus pada aktivitas litbang bidang kebijakan	Ya	Selama ini kegiatan penelitian sudah mengacu kebijakan yang ada. Karena ruang gerak peneliti juga dibatasi dengan kebijakan yang sudah ditetapkan	Kegiatan penelitian selalu mengacu ke kebijakan litbang yang ada atau aturan litbang yang ada, namun di luar lembaga litbang, kebijakan litbang belum tentu digunakan oleh misalnya perusahaan-perusahaan karena berbagai sebab.	Sudah sesuai, karena kalau tidak nggak dapat dana riset	Ya	Iya	
dasar digunakannya kebijakan							
Kesesuaian antara arah kebijakan dan tuisi penelitian kebijakan	Peningkatan SDM peneliti	Setiap ASN wajib memenuhi dan mentaati kebijakan yang sudah ditetapkan	Semua kebijakan litbang dan iptek di Indonesia mengaju ke UU Sisteknas	UU sisnas iptek dan turunannya	UU Sisteknas	Untuk menyelesaikan isu kebijakan berkaitan dengan critical mass SDM riset yang terbatas, anggaran riset yang di ecer-eceer, infrastruktur riset yang terbatas/obsolete.	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

kebijakan Litbang yang ada sekarang ini dirasakan sudah mendukung penelitian							
Terkait perizinan dan kolaborasi sudah mendukung, namun terkait pendanaan litbang dan insentif publikasi masih sangat terbatas	Sudah mendukung	Sudah	Untuk tingkat nasional masih terasa ada kekurangan. Hal ini disebabkan karena tidak banyaknya meningkatnya perkembangan litbang di sektor swasta setelah penerapan UU Sisteknas. Untuk internal organisasi, peraturan yang ada secara teoritis mendukung penelitian, namun secara praktek tidak karena selain menimbulkan kebingungan karena terlalu cepat diterapkan, juga tidak sesuai antara teoritis dan prakteknya.	Sebagian besar mendukung, walau belum pas benar	Iya	Iya, sudah mendukung.	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi
ada kebijakan yang dirasakan belum mendukung kegiatan litbang							
Skema pendanaan yang kaku dimana di	Ya, masih banyak peningkatan	Secara harfiah tidak ada, namun kalau detail mungkin ada	Untuk kebijakan internal organisasi adalah tidak	Lebih ke arah pengelolaan SDM peneliti	Masih perlu peningkatan	Tidak ada	Tidak bisa menjawab karena di

<p>ilmu sosial disamakan dengan ilmu eksakta. Selain itu dana yang ada untuk mendukung aktivitas litbang masing sangat terbatas</p>	<p>seperti system insentif buat peneliti, system punishment yang masih sangat memeberatkan peneliti, dukungan anggaran untuk conference dan publikasi (seperti proof reading, dll) anggaran riset, fasilitas pendukung seperti software, dll. Menurut bapak/ibu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Litbang tersebut?</p>	<p>beberapa aspek yang perlu disusun kebijakan atau regulasi. Misal peran peneliti di dalam pendampingan ke masyarakat/UMKM, atau mengurangi output target tahunan peneliti</p>	<p>seimbangnnya kebijakan 'reward and punishment' dimana kebijakan 'punishment' sangat dikedepankan, sedangkan 'reward' dianggap integral dengan pemberian gaji/tunjangan kinerja saja. Hal ini menyebabkan pegawai kurang bersemangat untuk melakukan hal yang lebih dibandingkan yang diperlukan untuk mencukupi kinerja saja. Untuk kebijakan di tingkat nasional hal yang mirip juga terjadi. Banyak pihak tidak merasakan gunanya atau 'reward' dalam melakukan litbang yang benar.</p>	<p>misalnya reward and punishment atau ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pengembangan pribadi</p>			<p>luar organisasi</p>
<p>siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Litbang tersebut</p>							

Pimpinan setingkat eselon II, koordinator program, koordinator sub program, ketua kelompok penelitian (keltian), dan para peneliti itu sendiri. Karena di tempat kami ialah juga sebagai aktivitas untuk merumuskan kebijakan.	TA	Semua civitas Litbang	Untuk tingkat nasional seharusnya harus difokuskan ke sektor swasta, namun pada kenyataannya lebih ke arah organisasi litbang pemerintah dan perguruan tinggi. Jika untuk tingkat organisasi, seharusnya semua pegawai ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan litbang yang ada atau sedang diterapkan.	Seharusnya semua lini di yang berkaitan dengan litbang, baik di tingkat pusat maupun di daerah	Seluruh pegawai	Eselon 1, 2, pegawai	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi
masalah dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut							
Masalah skema pendanaan yang masih kaku, dan model pertanggungjawaban kegiatan administrasi, serta capaian/luaran yang cukup berat dalam setahun terutama	Kebijakan peningkatan publikasi harusnya berbasis rewarads, bukan berbasis punishments; penetapan target publikasi harus realistis.	Waktu, biaya dan kapasitas SDM serta kondisi lapangan yang tidak bisa dilaksankanya atau sulit dilaksanakanya kebijakan tersebut. Contoh regulasi keuangan yang berbelit dan ribet	Hambatan utama dalam penerapan kebijakan litbang baik internal organisasi ataupun tingkat nasional adalah konsistensi dalam penerapannya, bagaimana kebijakan itu diterapkan dalam	Hambatan dan persoalan utama adalah komunikasi dan konsistensi dalam menerapkan aturan	Komunikasi	Kebijakan yang ada belum dibuatkan aturan turunan/juklak/juknis sehingga kesulitan pada saat implementasi di lapangan	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

untuk jurnal-jurnal reputasi menengahkan tinggi tanpa didukung biaya publikasi		untuk kegiatan penelitian	kehidupan sehari-harinya				
kebijakan apa yang sebaiknya dibuat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan litbang							
Kebijakan skema pendanaan fleksibel, pemberian insentif publikasi, serta kemudahan dalam mengakses data primer dari instansi terkait	-	Kebijakan tentang SDM, tata kerja SDM peneliti sesuai golongan dan kepakaran beserta insentif yang diterima harus lebih jelas lagi.	Secara nasional seharusnya kebijakan dibuat untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pelaksanaan litbang dengan memberikan berbagai insentif yang menarik secara praktis bagi pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat organisasi, karena sifat litbang adalah lebih bersifat kreatif dan sangat tergantung pada kondisi manusia, maka diperlukan kebijakan yang amat menyentuh manusia dan	Mungkin perlu adanya aturan untuk meyakinkan bahwa kebijakan itu benar-benar diterapkan dengan baik. Semacam klausul kewajiban	Perlu adanya pembuatan kebijakan turunan yang sesuai	Perlu turunan peraturan pelaksanaan yang lebih detail dan operasional sehingga pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan kebijakan dengan baik	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

			memberikan kondisi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan dalam melakukan litbang.				
latar belakang kejadian selama penerapan kebijakan litbang berlangsung							
Latar belakang kejadian selama penerapan kebijakan litbang dapat diketahui dari alasan mengapa kebijakan itu diterapkan, siapa pelaksana kebijakan, bagaimana dukungan/fasilitas kebijakan, dan bagaimana model kebijakan itu dijalankan. Pada umumnya, latar belakang kebijakan disertai dengan adanya isu-isu publik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah,	TA	Adanya reorganisasi di LIPI (sebelum jadi BRIN) banyak sekali hal2 yang perlu dirubah dan memakan banyak korban demi mewujudkan implementasi kebijakan riset yang baru. Misal penerapan output tahunan, PHK beberapa honorer db	Untuk tingkat organisasi, penerapan litbang berlatar belakang pada perubahan yang dibuat pada organisasi litbang, dimana presiden menghendaki efisiensi pada lembaga litbang yang memiliki anggaran yang tercecer untuk dapat disatukan agar lebih efisien.	Adanya reog LIPI dan perubahan BRIN	Reog LIPI	Kebijakan litbang yang dijalankan dikarenakan critical mass yang rendah dalam hal SDM riset, penggunaan anggaran yang tersebar diberbagai unit kerja, dan infrastruktur yang terbatas dikarenakan anggaran yang terbatas.	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

sehingga arah kebijakan itu akan diterapkan pada penyelesaian isu-isu tertentu.							
dampak dari kebijakan litbang yang telah diterapkan, baik untuk internal organisasi maupun masyarakat umum							
Dampak dari kebijakan litbang untuk internal organisasi ialah seperti adanya peningkatan aktivitas litbang, peningkatan kualitas pendidikan dan/atau keahlian dari peneliti/perekayasa atau SDM lainnya, peningkatan dana penelitian, peningkatan kerjasama riset dengan pihak luar, peningkatan publikasi, munculnya berbagai bentuk	Belum terlihat dampak positifnya	Kebijakan yang ada sekarang, bagi peneliti individu menurut saya cukup berat dan sangat demanding. Namun demikian secara garis besar sangat baik untuk pengembangan sistem Riset di masa yang akan datang. Bagi masyarakat umum, adanya kebijakan baru lebih memungkinkan mereka mengakses hasil serta infrastruktur riset untuk kemaslahatan mereka.	Saat ini belum banyak terlihat dampak positif bagi karyawan dalam penerapan kebijakan litbang dalam organisasi, sedangkan akibatnya bagi masyarakat umum adalah berkurangnya layanan iptek berupa pembimbingan, dll ke masyarakat yang membutuhkannya.	Masih terasa dampak negatifnya saja. Baik untuk di dalam maupun ke luar ke masyarakat, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani problem-problem yang muncul di masyarakat	Masih belum ada, masih terlihat negatif	Kebijakan litbang yang dijalankan meningkatkan kompetensi SDM melalui program by riset, anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan yang ada, infrastruktur litbang meningkat	Tidak bisa menjawab karena di luar organisasi

<p>workshop, seminar, dan bahkan konsorsium.</p> <p>Dampak bagi masyarakat umum jangka panjang ialah adanya kemandirian dalam berbagai hal seperti pangan, energi, pertahanan, keberlanjutan lingkungan, dan lainnya. Sementara jangka pendek ialah terdistribusinya pengetahuan yang ilmiah dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber pengetahuan lain yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**